

PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL KOTA MAGELANG TAHUN 2003-2018

THE EFFECT OF REVENUE SHARING FUNDS (RSF), GENERAL ALLOCATION FUNDS (GAF), SPECIAL ALLOCATION FUNDS (SAF), AND THE POPULATION ON CAPITAL EXPENDITURE IN MAGELANG CITY IN 2003-2018

¹⁾Fauziah Eka Permadani, ²⁾ Sudati Nur Sarfiah, ³⁾Panji Kusuma Prasetyanto

¹⁾Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

fauziah.eka33@yahoo.com

Abstrak

Kualitas kinerja keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan pengalokasian belanja daerah yang sesuai dengan penerimaan dan kebutuhan. Jenis belanja daerah yang manfaatnya langsung dapat dinikmati publik yaitu belanja modal. Dalam merealisasikan belanja modal, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan sumber penerimaan seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Komponen kebutuhan fiskal daerah seperti jumlah penduduk juga perlu dipertimbangkan dalam merealisasikan belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh DBH, DAU, DAK, dan jumlah penduduk terhadap belanja modal Kota Magelang tahun 2003-2018. Uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji statistik digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan yaitu ada pengaruh yang signifikan dari DAU dan DAK terhadap belanja modal. Namun, tidak ada pengaruh yang signifikan dari DBH dan jumlah penduduk terhadap belanja modal. Secara simultan, ada pengaruh yang signifikan dari DBH, DAU, DAK, dan jumlah penduduk terhadap belanja modal.

Kata kunci: Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Jumlah Penduduk

Abstract

The quality of regional financial performance can be improved by making regional allocations in accordance with revenue and needs. The type of regional expenditure that can be directly enjoyed by the public is capital expenditure. In realizing capital expenditure, local governments need to consider sources of revenue such as Revenue Sharing Funds (RSF), General Allocation Funds (GAF), and Special Allocation Funds (SAF). Components of regional fiscal needs such as population also need to be considered in realizing capital expenditure. The purpose of this study was to analyze the effect of RSF, GAF, SAF, and the population on capital expenditure in Magelang City in 2003-2018. The classic assumption tests, multiple linear regression test, and statistical tests are used as analysis techniques in this research. The results showed a number of findings that there was a significant effect of GAF and SAF on capital expenditure. However, there was no significant effect of RSF and the population on capital expenditure. Simultaneously, there was a significant effect of RSF, GAF, SAF, and population on capital expenditure.

Keywords: Capital Expenditure, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and The Population

PENDAHULUAN

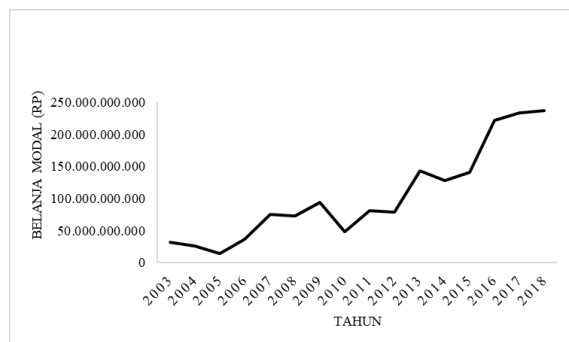
Sistem sentralisasi yang belum sempurna menyebabkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam di tengah banyaknya perbedaan karakteristik dan variasi potensi yang ada pada masing-masing daerah. Upaya pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang lebih baik di seluruh daerah adalah dengan melakukan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.

Tujuan otonomi daerah dapat diwujudkan dengan mengembangkan potensi daerah, mengelola sumber daya yang dimiliki, serta meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah supaya lebih efisien dan efektif maka perlu dilakukan pengalokasian belanja daerah yang sesuai dengan penerimaan dan kebutuhan. Jenis belanja daerah yang manfaatnya langsung dapat dinikmati publik yaitu belanja modal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengartikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan

daerah dan pertimbangan sumber penerimaan daerah apakah mencukupi alokasi belanja di daerah atau tidak.

Banyaknya pembangunan yang dilakukan berdampak pada besarnya belanja modal di suatu wilayah, seperti yang terjadi di Kota Magelang. Kota Magelang merupakan kota yang sedang bersiap menjadi Kota Satelit. Dikatakan sedang bersiap menjadi Kota Satelit karena Pemerintah Kota Magelang banyak melakukan pembangunan untuk merespon beragam pembangunan yang terjadi di daerah sekitar Kota Magelang. Pembangunan ini bukan hanya dilakukan untuk memudahkan akses pariwisata saja, tetapi juga untuk memudahkan kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Magelang (Ferri, 2019). Oleh karena sedang mempersiapkan diri menjadi Kota Satelit, seharusnya belanja modal Kota Magelang lebih ditingkatkan tetapi kondisi sebenarnya menunjukkan bahwa peningkatan belanja modalnya masih relatif lambat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, belanja modal di Kota Magelang pada tahun 2003-2018 sangat fluktuatif. Berikut merupakan gambar 1. yang menyajikan jumlah belanja modal Kota Magelang pada tahun 2003-2018.



Sumber: BPS dan PPID Kota Magelang

Gambar 1 Belanja Modal Kota Magelang Tahun 2003-2018

Gambar 1 menunjukkan bahwa belanja modal di Kota Magelang pada tahun 2003-2018 mengalami fluktuasi tetapi jumlahnya cenderung meningkat. Namun, pertumbuhan belanja modal dari tahun ke tahun cukup lambat. Imam Subagyo dalam Ferri (2017) mengatakan bahwa serapan anggaran di Kota Magelang baru mencapai 54 persen padahal seharusnya dapat mencapai angka 90 persen. Rendahnya angka serapan anggaran dapat terjadi akibat belanja modal yang masih rendah. Belanja modal Kota Magelang sangat berfluktuasi pada tahun 2003-2018, dan baru pada tahun 2015 jumlahnya berangsur-angsur mengalami peningkatan hingga menjadi sebesar Rp 237.422.914.193,00 pada akhir tahun 2018. Askolani dalam Olivia (2019) mengemukakan bahwa lambatnya pertumbuhan realisasi belanja modal disebabkan karena belanja daerah jenis ini sifatnya multiyear atau membutuhkan beberapa tahun pembangunan.

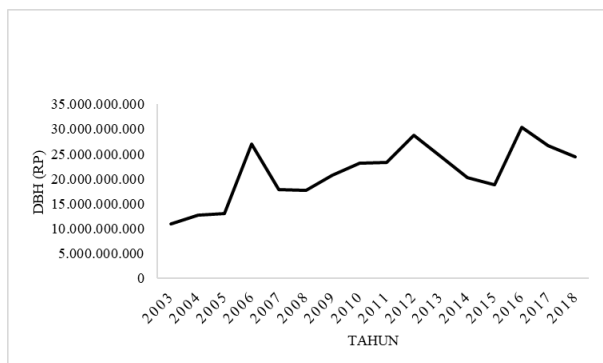
Setiap daerah harus memiliki sumber penerimaan agar bisa membiayai belanja

modal. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

Beberapa daerah memiliki PAD yang cukup untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerahnya, tetapi beberapa daerah lainnya kesulitan untuk mendanai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Jika terus dibiarkan maka akan timbul ketimpangan fiskal antar daerah. Pemerintah dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan fiskal antar daerah memberikan dana perimbangan untuk masing-masing daerah, sebab pemerintah akan selalu mempertimbangkan sumber penerimaan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mengalokasikan belanja modal (Sholikhah dan Wahyudin, 2014: 560)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibagi menjadi tiga yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengartikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dana yang berasal dari APBN Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan

negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Berikut merupakan gambar 2 yang menunjukkan jumlah DBH di Kota Magelang tahun 2003-2018.

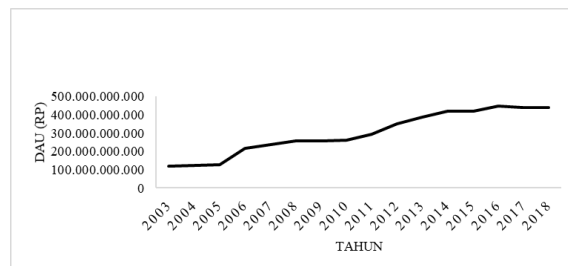


Sumber: BPS dan PPID Kota Magelang
Gambar 2 Dana Bagi Hasil Kota Magelang Tahun 2003-2018

Berdasarkan gambar 2, jumlah DBH di Kota Magelang sangat fluktuatif. Penyebab mengapa realisasi penerimaan DBH tahun 2018 lebih kecil dari anggarannya disebabkan oleh menurunnya DBH dari Pemerintah Pusat akibat penerimaan bukan pajak migas yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ketika penerimaan Pemerintah Daerah semakin meningkat maka kemampuan untuk merealisasikan belanja modal untuk kepentingan publik dapat ditingkatkan dan ketika penerimaan Pemerintah Daerah menurun maka kemampuan untuk merealisasikan belanja modal untuk kepentingan publik menjadi semakin rendah.

Dana perimbangan yang kedua adalah DAU. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengartikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana yang berasal dari APBN,

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikut merupakan gambar yang menyajikan jumlah DAU di Kota Magelang tahun 2003-2018.

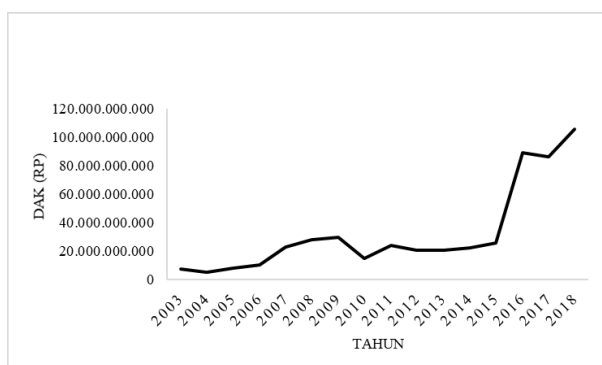


Sumber: BPS dan PPID Kota Magelang
Gambar 3 Dana Alokasi Umum Kota Magelang Tahun 2003-2018

Berdasarkan gambar 3, jumlah DAU relatif meningkat pada tahun 2003-2016. DAU terus ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat untuk dialokasikan ke Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Meskipun pada periode tahun 2003-2018 DAU Kota Magelang cenderung meningkat tetapi pemanfaatan DAU untuk membiayai belanja modal kurang efektif, sebab peningkatan DAU yang terjadi ini tidak diiringi dengan peningkatan belanja modal yang cukup stabil.

DAK juga merupakan bagian dari dana perimbangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengartikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai dana dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan

tertentu. Besaran DAK setiap daerah berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. DAK berasal dari Pemerintah Pusat dan jumlah DAK tiap daerah berbeda-beda. Kota Magelang mendapatkan DAK yang jumlahnya tidak tetap selama tahun 2003-2018, tetapi nilainya cenderung mengalami kenaikan.

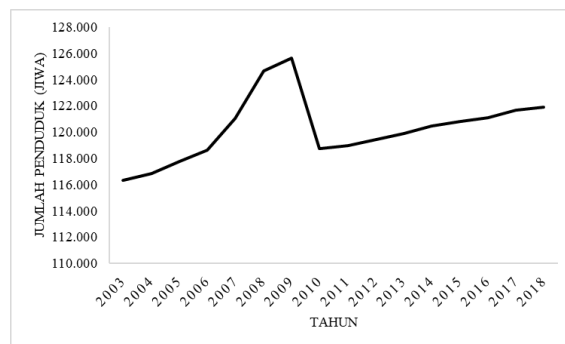


Sumber: BPS dan PPID Kota Magelang
Gambar 4 Dana Alokasi Khusus Kota Magelang Tahun 2003-2018

Pertumbuhan DAK Kota Magelang tidak menentu karena DAK untuk Pemerintah Daerah diberikan untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan khusus daerah. DAK yang nilainya sangat fluktuatif juga berdampak pada banyaknya jumlah penerimaan daerah, selanjutnya sumber penerimaan daerah ini mempengaruhi alokasi belanja modal di daerah (Wandira, 2013: 49).

Selain dana perimbangan, komponen kebutuhan fiskal seperti jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi besarnya belanja modal. Tingkat pengadaan modal sebisa mungkin harus seimbang dengan pertumbuhan penduduk karena hal tersebut merupakan syarat fundamental untuk pembangunan

ekonomi (Eriyanto, 2017: 2-3). Berikut merupakan gambar yang menyajikan data jumlah penduduk di Kota Magelang tahun 2003- 2018.



Sumber: BPS dan PPID Kota Magelang
Gambar 5 Jumlah Penduduk Kota Magelang Tahun 2003-2018

Berdasarkan data dari BPS yang disajikan dalam gambar 5, jumlah penduduk di Kota Magelang relatif meningkat pada tahun 2003-2018 tetapi terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2010 menjadi sebesar 188.713 jiwa. Meski terjadi penurunan pada tahun 2010, tetapi jumlah penduduk Kota Magelang mengalami peningkatan hingga tahun 2018.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja modal, tetapi penelitian-penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten. Terjadi pula research gap yang kerap tidak melibatkan jumlah penduduk sebagai variabel independen yang mempengaruhi belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas tentang pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH),

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan jumlah penduduk terhadap belanja modal di Kota Magelang tahun 2003-2018.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dipilih untuk menguji penelitian dengan cara merinci hipotesis-hipotesis spesifik menggunakan sekumpulan data yang dapat diukur.

Waktu dan Tempat Penelitian

Data yang digunakan adalah yang disusun menjadi data time series dengan tahun periode 2003-2018 dan penelitian ini dilakukan di Kota Magelang.

Target/Subjek Penelitian

Target/subjek dalam penelitian ini diantaranya:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) di Kota Magelang tahun 2003-2018 dengan satuan rupiah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Magelang tahun 2003-2018 dengan satuan rupiah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota Magelang tahun 2003-2018 dengan satuan rupiah.
4. Jumlah penduduk di Kota Magelang tahun 2003-2018 dengan satuan jiwa.
5. Belanja modal di Kota Magelang tahun 2003-2018 dengan satuan rupiah

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan

Data

Instrumen penelitian yang diartikan sebagai alat bantu dalam penelitian ini menggunakan jenis metode dokumentasi. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti data belanja modal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan jumlah penduduk tahun 2003-2018 yang diperoleh dari instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Magelang. Kemudian, data disusun menjadi data time series dengan tahun periode 2003-2018.

Teknik Analisis Data

Uji asumsi klasik dilakukan karena hasil model regresi yang ingin dicapai adalah Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian, akan dilanjutkan dengan melakukan uji regresi linear berganda untuk memprediksi pengaruh antara variabel dependen dan independen. Berikut merupakan persamaan untuk menghitung regresi berganda yang digunakan:

$$y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + u$$

Perbedaan satuan dan besaran

variabel menyebabkan persamaan regresi harus dibuat model logaritma. Menurut Ariefianto (2012: 59-60), persamaan regresi dapat dispesifikasikan dalam bentuk fungsional lain seperti transformasi tertentu dengan menggunakan logaritma. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk memperoleh fitur statistik yang lebih baik, mengurangi dispersi/sebaran dari variabel, serta mengurangi gejala heteroskedastisitas. Oleh sebab itu, persamaan regresi setelah dilakukan transformasi logaritma yaitu:

$$\ln y = \beta_0 + \beta_1 \ln x_1 + \beta_2 \ln x_2 + \beta_3 \ln x_3 + \beta_4 \ln x_4 + u$$

Keterangan:

- y = Belanja Modal
- x1 = Dana Bagi Hasil
- x2 = Dana Alokasi Umum
- x3 = Dana Alokasi Khusus
- x4 = Jumlah Penduduk
- β = Parameter estimate
- u = Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak sehingga terkadang bisa juga disebut sebagai uji kenormalan. Model regresi dikatakan baik apabila data berdistribusi

normal. Kriteria pengambilan kesimpulan untuk uji normalitas dilihat dari nilai signifikansinya. Jika probabilitas Jarque-Bera > 0,05 maka variabel berdistribusi normal dan jika probabilitas Jarque-Bera < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	2.250937
Probabilitas	0.324500

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera adalah sebesar 0,324500 lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar $\alpha = 5\%$ atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan linear antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi kolerasi antar variabel. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2127.294	601480.0	NA
LNDBH	0.121262	19326.86	2.968800
LNDAU	0.093553	18347.74	5.383556

LNDAK	0.021381	3441.591	4.255130
LNJP	16.03289	620230.6	1.843992

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dari empat variabel independen tersebut kurang dari 10 sehingga model regresi dinyatakan lolos uji multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian bertujuan untuk mendeteksi hubungan antar residual pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Data tidak terindikasi mengandung autokorelasi jika nilai probabilitas Chi-Square lebih besar daripada $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Sebaliknya, data terindikasi mengandung autokorelasi jika nilai probabilitas Chi-Square lebih kecil daripada $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Berikut merupakan tabel 3 yang menyajikan hasil uji autokorelasi:

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	2.457279	Prob. F(2,9)	0.1408
Obs*R-squared	5.651126	Prob. Chi-Square(2)	0.0593

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas Chi-Square pada Obs*R-squared adalah sebesar 0,0593 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Hal ini berarti data tidak terindikasi mengandung autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk melihat ada tidaknya gejala

heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas Chi-Square $< \alpha = 5\%$ atau 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun, jika nilai probabilitas Chi-Square $> \alpha = 5\%$ atau 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tabel 4 menunjukkan ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam uji glejser.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2.584642	Prob. F(4,11)	0.0958
Obs*R-squared Scaled explained SS	7.752023	Prob. Chi-Square(4)	0.1011
	6.394746	Prob. Chi-Square(4)	0.1715

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10

Hasil uji glejser yang disajikan oleh tabel 4 menunjukkan bahwa probabilitas Chi-Square Obs*R-squared adalah 0,1011. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Regresi Linear berganda

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda setelah menggunakan model logaritma natural, maka dapat diperoleh persamaan regresi berganda seperti berikut ini:

$$\ln y = 2,239 - 0,599 \ln x_1 + 1,352 \ln x_2 + 0,417 \ln x_3 - 0,727 \ln x_4 + u$$

Hasil persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 2,239 bernilai positif adalah estimasi dari belanja modal. Apabila Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan jumlah penduduk dianggap tetap maka belanja modal di Kota Magelang rata-rata bertambah sebesar Rp 2.239.000,00.
2. Nilai koefisien x1 adalah -0,599 bernilai negatif, artinya bahwa jika Dana Bagi Hasil meningkat sebesar Rp 1.000.000,00 maka akan terjadi penurunan untuk belanja modal sebesar Rp 599.000,00 dengan asumsi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan jumlah penduduk dianggap tetap.
3. Nilai koefisien x2 adalah 1,352 bernilai positif, artinya bahwa jika Dana Alokasi Umum meningkat sebesar Rp 1000.000,00 maka akan terjadi peningkatan untuk belanja modal sebesar Rp 1.352.000,00 dengan asumsi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan jumlah penduduk dianggap tetap.
4. Nilai koefisien x3 adalah 0.417 bernilai positif, artinya bahwa jika Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar Rp 1000.000,00 maka akan terjadi peningkatan untuk belanja modal sebesar Rp 417.000,00 dengan asumsi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan jumlah penduduk dianggap tetap.

5. Nilai koefisien x4 adalah -0.727 bernilai negatif, artinya bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk per jiwa maka akan menurunkan belanja modal sebesar Rp 727.000,00 dengan asumsi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dianggap tetap.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menjelaskan varians dari variabel dependen. Setelah data-data diolah, maka dapat diperoleh hasil dari uji koefisien determinasi seperti yang disajikan pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.940246
Adjusted R-squared	0.918517

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.11, nilai Adjusted R-squared yang diperoleh adalah sebesar 0,918517 atau 91,8517 persen. Artinya sebanyak 91,8517 persen keempat variabel independen dapat memprediksi dengan baik variabel belanja modal dan sisanya sebanyak 8,1483 persen variabel belanja modal dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji Statistik

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen secara parsial

dengan tingkat kepercayaan yang digunakan lazimnya berkisar antara 90% – 99%. Pengujian uji signifikansi secara parsial ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Berikut merupakan tabel 6 yang menunjukkan hasil uji t .

Tabel 6 Ringkasan Hasil Uji t

Variabel	t hitung
Dana Bagi Hasil (DBH)	-1.720592
Dana Alokasi Umum (DAU)	4.420867
Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.858375
Jumlah Penduduk	-0.181613

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10

Hasil uji t hitung dalam penelitian ini yaitu:

1. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu - 1,720592 < 2,200 dan nilai probabilitas t hitung lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0.1133 > 0,05. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Kota Magelang Tahun 2003-2018.
2. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 4,420867 > 2,200 dan nilai probabilitas t hitung lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau 0.0010 < 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal Kota Magelang Tahun 2003-2018.
3. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu

2,858375 > 2,200 dan nilai probabilitas t hitung lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0.0156 < 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal Kota Magelang Tahun 2003-2018.

4. Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu - 0,181613 < 2,200 dan nilai probabilitas t hitung lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0.8592 > 0,05. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk terhadap belanja modal Kota Magelang Tahun 2003-2018.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen apabila diuji secara bersama-sama. Nilai F hitung yang diperoleh dari analisis regresi berganda adalah sebesar 43,27173. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan probabilitasnya sebesar 0.000001 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap belanja modal di Kota Magelang tahun 2003-2018.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kota Magelang Tahun 2003-2018

Berdasarkan hasil uji t data time series Eviews 10, dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal Kota Magelang Tahun 2003-2018. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sarif (2017:46) yang mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dalam hukum Wagner memang dikatakan bahwa ketika penerimaan pemerintah meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesoebroto, 2016: 171). Namun, keadaan yang terjadi di Kota Magelang menunjukkan hal yang sebaliknya. Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal Kota Magelang karena data dalam gambar 1 yang menyajikan jumlah belanja modal, gambar 2 yang menyajikan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH), gambar 3 yang menyajikan Dana Alokasi Umum (DAU), dan gambar 4 yang menyajikan Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan bahwa meskipun DBH menurun tetapi belanja modal tetap dapat ditingkatkan karena pendapatan dari sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU) terus mengalami peningkatan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

terhadap Belanja Modal Kota Magelang Tahun 2003-2018

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan regresi data time series Eviews 10, dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal Kota Magelang Tahun 2003-2018. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nuarisa (2013: 93) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal sebab daerah yang memiliki pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang besar dapat mengalokasikan anggaran belanja modal yang lebih besar pula. Artinya, ketika Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Magelang meningkat maka belanja modal yang direalisasikan Pemerintah Kota Magelang akan semakin meningkat karena kemampuan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan jenis dana perimbangan yang jumlahnya paling besar diantara jenis dana perimbangan lainnya seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sumber penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) juga dapat digunakan untuk membiayai jenis belanja daerah yang lainnya. Hal ini sesuai dengan Hukum Wagner yang menyatakan bahwa ketika

penerimaan pemerintah meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesoebroto, 2016: 171).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kota Magelang Tahun 2003-2018

Berdasarkan hasil regresi data time series menggunakan Eviews 10, dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal Kota Magelang Tahun 2003- 2018. Ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal Kota Magelang karena jika Pemerintah Daerah memiliki sumber penerimaan yang lebih besar maka belanja modal yang direalisasikan dapat lebih banyak. Sebaliknya, jika Pemerintah Daerah memiliki sumber penerimaan yang lebih kecil maka belanja modal yang direalisasikan juga semakin lebih sedikit. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wandira (2013: 49) yang mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Magelang dapat meningkat setiap tahun ketika pembangunan dengan kriteria tertentu di Kota Magelang terus mengalami peningkatan. Namun, pembangunan hanya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan daerah tiap tahunnya berbeda-beda sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dibutuhkan untuk pembangunan juga berbeda-beda pula. Hal ini

menyebabkan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Magelang tidak menentu. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya berfluktuasi menyebabkan sumber penerimaan dari dana perimbangan juga berfluktuasi sehingga belanja modal yang dikeluarkan tidak stabil.

Pengaruh jumlah penduduk terhadap Belanja Modal Kota Magelang Tahun 2003-2018

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan regresi data time series Eviews 10, dapat diketahui bahwa uji t menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk terhadap belanja modal Kota Magelang Tahun 2003- 2018. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aziz dan Ririn Wulandari (2013) dalam Sari dan Ningsih (2018: 100) yang mengemukakan bahwa kepadatan penduduk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Jika jumlah penduduk sebagai salah satu komponen kebutuhan daerah mengalami peningkatan maka belanja modal yang dikeluarkan harus lebih banyak, tetapi perbedaan ruang dan waktu yang ada menyebabkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari jumlah penduduk terhadap belanja modal di Kota Magelang. Hal ini disebabkan karena penambahan

penduduk yang terjadi kurang diimbangi dengan peningkatan belanja modal. Selain itu, terdapat pula ketidakmerataan kepadatan daerah. Kepadatan penduduk Kota Magelang per km² adalah sebesar 6.564 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Magelang Tengah yaitu sebesar 8.680 jiwa/km² sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Magelang Utara yaitu sebesar 5.800 jiwa/km². Daerah yang lebih dekat dengan pusat kota umumnya memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi sehingga pembangunan fisik seperti bangunan dan gedung, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, serta belanja aset tetap lainnya cenderung lebih banyak dilakukan di dekat pusat kota dibandingkan di daerah pinggir kota.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan jumlah penduduk terhadap Belanja Modal Kota Magelang Tahun 2003-2018

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan regresi data time series Eviews 10, dapat diketahui bahwa uji F menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap belanja modal Kota Magelang Tahun 2003-2018. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imroatus Sholikhah dan

Agus Wahyudin (2014). Hal ini dikarenakan Peningkatan sumber penerimaan dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap realisasi belanja modal daerah. Kemudian, pertambahan jumlah penduduk sebagai komponen kebutuhan fiskal daerah diharapkan mampu meningkatkan belanja modal karena pengadaan modal pembangunan harus mengimbangi pertambahan penduduk suatu wilayah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal Kota Magelang tahun 2003-2018.
2. Ada pengaruh yang signifikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal Kota Magelang tahun 2003-2018.
3. Ada pengaruh yang signifikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal Kota Magelang tahun 2003-2018.
4. Tidak ada pengaruh yang signifikan dari jumlah penduduk terhadap belanja modal Kota Magelang tahun 2003-

2018.

5. Ada pengaruh yang signifikan dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap belanja modal di Kota Magelang tahun 2003-2018.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dari hasil penelitian, tidak ada pengaruh yang signifikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang diharapkan mampu menggali potensi-potensi yang ada, salah satunya dengan meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga Dana Bagi Hasil yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dapat lebih ditingkatkan dan menambah sumber penerimaan daerah untuk membiayai belanja modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kota Magelang berjumlah besar dan merupakan jenis dana perimbangan yang jumlahnya paling besar, sehingga Pemerintah Kota Magelang hendaknya dalam melakukan belanja modal lebih memperhatikan penerimaan Dana Alokasi Umum yang diterima supaya serapan anggaran tinggi dan penerimaan daerah dapat digunakan secara lebih produktif dalam memenuhi kebutuhan fiskal dan

kepentingan publik.

3. Pemerintah Daerah Kota Magelang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan fisik dan kegiatan khusus yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, salah satu contohnya seperti pembangunan jalan dan irigasi sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dapat meningkat.
4. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Magelang sehingga pembangunan fisik dan pelayanan publik yang dilakukan perlu mengimbangi pertumbuhan penduduk supaya kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah meningkat.
5. Keterkaitan antara Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan jumlah penduduk terhadap belanja modal dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam melakukan pengeluaran belanja modal sebaiknya Pemerintah Kota Magelang memperhatikan sumber penerimaan dan kebutuhan fiskal daerah agar tercipta kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Pemerintah Kota Magelang juga diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat supaya fasilitas dan pelayanan publik yang

disediakan dapat digunakan secara lebih bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, Moch Doddy. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EVIEWS*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pusat Statistik Kota Magelang. 2019. *Magelang Kota Dalam Angka 2004-2018*. Magelang: Badan Pusat Statistik.
- Eriyanto, Muhammad Nur Khabib. 2017. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten Magelang Tahun 2001-2015*. Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas Tidar.
- Ferri, R. 2017. *Pembangunan Magelang dan Temanggung Tak Optimal Belanja Modal Cuma 54 Persen*, diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/amp/2017/12/20/pembangunan-magelang-dan-temanggung-tak-optimal-belanja-modal-cuma-54-persen> pada 15 November 2019.
- _____. 2019. *Kota Magelang Bersiap Jadi Kota "Satelit"*, diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/06/19/kota-magelang-bersiap-jadi-kota-satelit> pada 15 November 2019.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Nuarisa, Sheila Ardhan. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2, No. 1: 89-95.
- Olivia, Grace. 2019. *Belanja Modal Tumbuh Lambat Lima Tahun Terakhir, Pemerintah Diminta Tambah Pagu*, diakses dari <https://www.google.com/amp/amp/kontan.co.id/news/belanja-modal-tumbuh-lambat-lima-tahun-terakhir-pemerintah-diminta-tambah-pagu> pada 29 November 2019.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Magelang. 2018. *Laporan Realisasi Anggaran Kota Magelang 2010-2018*, diakses dari <http://ppid.magelangkota.go.id> pada 31 Oktober 2019.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sari, Pertama dan Nurul Hutami Ningsih. 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal melalui PAD, DAU, dan DAK sebagai Variabel Intervening*. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*. Vol. 12, No. 2: 99-112.
- Sarif, Mohamad. 2017. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Survey Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah)*. *E Jurnal Katalogis*. Vol. 5, No. 5: 38-48.
- Sholikhah, I. dan Agus Wahyudi. 2014. *Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa*. *Accounting Analysis*

Journal. Vol. 3, No.4: 553–562.

No. 1: 44-51.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAU, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2,

Winarno, Wing Wahyu. 2015. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews. Yogyakarta: UPP STIM YK